

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2019. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Abdul Razak. 2021. *Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Litera
3. Achmad Ruslan. 2021. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Tangerang: Rangkang Education
4. Aminuddin Ilmar. 2023. *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Makassar: Phinatama Media
5. Aminuddin Ilmar. 2018. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana
6. Anwar, *et.al.*. 2021. *Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
7. Darda Syahrizal. 2013. *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital
8. Dina Susiani. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. Jember: CV. PUSTAKA ABADI
9. Eduard Awang Maha Putra. 2024. *Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: Samudera Biru

10. Fajlurrahman Jurdi. 2023. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana
11. Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Kencana
12. Irwansyah. 2020. *Kajian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media
13. Irwansyah. 2021. *Refleksi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Mirra Buana Media
14. Mhd. Taufiqurrahman. 2021. *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi
15. Muhammad Sadi Is dan Kun Budiarto. 2021. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana
16. Muhammad Tahir Azhary, et.al. 2015. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H. Akademisi, Praktisi, dan Politisi*. Jakarta: Kencana
17. Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. 2020. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Makassar: SIGn
18. Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana
19. Putera Asnomo. 2019. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers
20. Ridwan HR. 2017. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers

21. Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel. 2019. *Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Elektronik*. Jakarta: Kencana
22. Wisnu Agung Nugroho, et.al. 2024. *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia Teori dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia

B. Jurnal

1. Diah Nur Cahyani. 2019. "Persyaratan dan Prosedur Penggunaan Diskresi Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". *Lex Administratum*. Vol. 7 No. 3
2. Julista Mustamu. 2011. *Diskresi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Sasi. Vol. 17 No. 2
3. M. Beni Kurniawan. 2018. "Penggunaan Diskresi dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Thahar ditinjau dari Asas Pemerintahan yang Baik". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*. Vol. 18 No. 2
4. Muhammad Khaerul Luthfi. 2024. "Pertanggungjawaban atas Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara". *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*. Vol. 1 No. 4
5. Moudy Raul Ghozali. 2021. "Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pemerintahan dari Ancaman Pidana dalam Penggunaan Diskresi". *Mimbar Keadilan*. Vol. 14 No. 2

6. Rossi Suparman. 2020. "Pelaksanaan Diskresi Aparatur Sipil Negara Dalam Rangka Penegakan Hukum". Vol. 6 No. 1. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana
7. Syofyan Hadi dan Moudy Raul Ghozali. 2022. "Perlindungan Hukum bagi Rakyat dalam Penggunaan Diskresi Pemerintahan pada Masa Pandemi Covid-19". DiH: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 18 No. 1
8. Victor Imanuel W. Nalle. 2016. "Kedudukan Peraturan Kebijakan dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan". *Refleksi Hukum*. Vol. 10 No. 1

C. Dokumen Peraturan

1. Naskah Akademik RUU Administrasi Pemerintahan
2. Naskah Akademik RUU Cipta Kerja
3. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

D. Situs Internet

1. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ke-mana-bisa-melakukan-pengujian-peraturan-kebijakan-lt5f4b669c17662>, diakses pada tanggal 11 Desember 2023 dan 15 Juni 2024
2. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-tata-usaha-negara-lt62a29cca9f65d/?page=3>, diakses pada tanggal 15 Juni 2024
3. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peraturan-dan-keputusan-lt4f0281130c750>, diakses pada tanggal 22 Januari 2024
4. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-peraturan-kebijakan-dan-kedudukannya-lt65b0fb2e6e0f9/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2024
5. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-ma--surat-edaran-bukan-objek-hak-uji-materiil-lt58f4255c93fc1/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2024

E. Tesis/Disertasi

1. Kasman Lassa. 2021. *Penggunaan Diskresi oleh Kepala Daerah pada Penanggulangan Bencana Alam*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2. Mas Bakar. 2005. *Hakikat Peradilan Administrasi dan Implementasinya dalam Penegakan Hukum*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

3. Muhammad Thabrani Mutalib. 2017. *Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) di Indonesia*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia